



Pemerintah
Kabupaten
Cianjur



LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TA. 2024

Dinas Perhubungan
Kabupaten Cianjur



Jl. Dr Muwardi No. 395
Muka, Kec. Cianjur,
Kabupaten Cianjur, Jawa
Barat 43215



Instagram
@dishub_cianjur



Email
dishub@cianjurkab.go.id



Link
<https://dishub.cianjurkab.go.id>

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Laporan ini memuat berbagai capaian kinerja yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024, termasuk upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor transportasi, pengelolaan infrastruktur transportasi yang aman, nyaman, dan berkeselamatan, serta optimalisasi penerangan jalan umum sebagai bagian dari program prioritas daerah.

Kami menyadari bahwa pencapaian kinerja ini tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama berbagai pihak, baik dari jajaran internal Dinas Perhubungan, instansi pemerintah lainnya, maupun masyarakat Kabupaten Cianjur. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi dan partisipasi yang telah diberikan.

Kami juga menyadari bahwa dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja ini masih terdapat kekurangan yang perlu menjadi perhatian dan perbaikan di masa mendatang. Untuk itu, kritik, saran, dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan demi meningkatkan kualitas kinerja Dinas Perhubungan pada tahun-tahun yang akan datang.

Semoga laporan ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Cianjur.

Cianjur, Februari 2025

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Cianjur,



Drs. TEDY ARTIAWAN, M.Si
NIP. 19661127 198703 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Tujuan dan Fungsi Dinas Perhubungan	2
1.4 Gambaran Umum Dinas Perhubungan	3
1.5 Struktur Organisasi	9
1.6 Isu Strategis	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12
2.1 Rencana Strategis Dinas Perhubungan	12
2.2 Cascading Kinerja	16
2.3 Peta Proses Bisnis	16
2.4 Perjanjian Kinerja	17
2.5 Rencana Anggaran	18
BAB III AKUNTABILITAS KERJA	19
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	19
3.2 Kerangka Pengukuran Kinerja	19
3.3 Capaian Indikator Kinerja (IKU)	20
3.4 Pengukuran dan Analisis Kinerja	22
3.5 Informasi Keuangan Terkait Pencapaian Sasaran	30
3. 6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	38
BAB IV PENUTUP	41
4.1 Kesimpulan	41
4.2 Hambatan dan Upaya	41

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja Dinas Perhubungan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tingkat Pencapaian IKU

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	> 91	Sangat Tinggi	
2.	76 > 90	Tinggi	
3.	66 > 75	Sedang	
4.	51 > 65	Rendah	
5.	< 50	Sangat Rendah	



Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) berada dalam kategori **SANGAT TINGGI** pada 2 indikator dan kategori **SEDANG** pada 1 indikator. Dalam capaian tersebut, terdapat 1 indikator kinerja yang telah melebihi target, 1 indikator yang telah sesuai dengan target, namun masih terdapat 1 indikator yang belum mencapai target. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh kurangnya pengawasan di lapangan terhadap kendaraan wajib uji, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengujian kendaraan untuk menjamin keselamatan, keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan pengujian, serta rusaknya kendaraan pengujian keliling yang menghambat proses pelayanan kepada masyarakat.



Pemerintah
Kabupaten
Cianjur



BAB I

PENDAHULUAN



Jl. Dr Muwardi No. 395
Muka, Kec. Cianjur,
Kabupaten Cianjur, Jawa
Barat 43215



Instagram
@dishub_cianjur



Email
dishub@cianjurkab.go.id



Link
<https://dishub.cianjurkab.go.id>



1.1 LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah dalam mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat untuk mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, bersih, dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. *Good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan koordinasi, integritas, profesionalisme, serta partisipasi aktif dari sektor swasta dan masyarakat.

Setiap instansi pemerintah, termasuk Dinas Perhubungan, memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, termasuk pengelolaan sumber daya yang ada, sesuai dengan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Sebagai bentuk akuntabilitas publik, kewajiban ini diatur melalui Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai sarana evaluasi dan pengukuran kinerja terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Di sisi lain, implementasi otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015, memberikan kewenangan penuh kepada daerah untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat setempat. Hal ini memberikan peluang bagi setiap daerah, termasuk Kabupaten Cianjur, untuk mengembangkan potensi wilayah secara mandiri, termasuk dalam penyelenggaraan sistem transportasi yang mendukung kebutuhan masyarakat.

Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur, sebagai salah satu perangkat daerah, memiliki peran strategis dalam mendukung terciptanya sistem transportasi yang aman, nyaman, dan berkeselamatan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengelolaan sarana dan prasarana transportasi yang terpadu. Beberapa tantangan yang dihadapi, seperti pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi, peningkatan kualitas layanan transportasi publik, serta pengelolaan penerangan jalan umum (PJU), menuntut adanya perencanaan dan pengelolaan yang efektif.

Keseluruhan aspek ini menjadi dasar pentingnya penyusunan LKIP sebagai wujud akuntabilitas Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan. Melalui laporan ini, diharapkan dapat dilakukan evaluasi yang komprehensif terhadap capaian kinerja, sekaligus menjadi pedoman perbaikan untuk mendukung pembangunan sistem transportasi yang berdaya guna bagi masyarakat Kabupaten Cianjur.



1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program / kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur adalah:

1. Menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja program, kegiatan, dan sasaran strategis Dinas Perhubungan.
2. Mengidentifikasi kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi sebagai bahan masukan untuk menyusun kebijakan, perencanaan strategis, dan perbaikan kinerja Dinas Perhubungan di masa mendatang.
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya, sehingga mendukung penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.3 TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN

Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur terletak di Jalan Dr. Muwardi No. 395, Kabupaten Cianjur. Dinas ini merupakan salah satu dari 18 (delapan belas) perangkat daerah yang berada di bawah Pemerintah Kabupaten Cianjur, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur. Berdasarkan peraturan tersebut, Dinas Perhubungan ditetapkan sebagai perangkat daerah dengan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan diatur melalui Peraturan Bupati Cianjur Nomor 99 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur. Berdasarkan peraturan tersebut, Dinas Perhubungan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas Dinas Perhubungan

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta tugas pembantuan di bidang perhubungan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten.

Fungsi Dinas Perhubungan

1. Perumusan kebijakan dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang perhubungan.



2. Pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pelaksanaan administrasi dinas dan pelayanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

1.4 GAMBARAN UMUM DINAS PERHUBUNGAN

1.4.1 Penataan Organisasi Dinas Perhubungan

Adapun susunan organisasinya sebagai berikut :

- 1) Unsur-unsur Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:
 - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris
 - c. Unsur Pelaksana adalah Kepala Bidang, Sub bagian, Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Lalu Lintas membawahkan :
 1. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 2. Seksi Perlengkapan Jalan;
 3. JF Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub.Koordinator Seksi Pengendalian Operasional)
 - d. Bidang Angkutan membawahkan :
 1. Seksi Angkutan Orang;
 2. Seksi Angkutan Khusus dan Barang;
 - e. Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan membawahkan :
 1. Seksi Teknik Sarana;
 2. Seksi Teknik Keselamatan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) :
 1. UPTD Terminal Rawabango;
 2. UPTD Terminal Pasir Hayam;
 3. UPTD Terminal Cipanas;

4. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

g. Kelompok Jabatan Fungsional : Penguji Kendaraan Bermotor

Tugas yang dibebankan kepada unsur organisasi adalah sebagai berikut:

- a) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan;
- b) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian perencanaan program, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan;
- c) Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi dinas di bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas serta Keselamatan Lalu Lintas;
- d) Bidang Angkutan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan, koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis angkutan orang, serta angkutan khusus barang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- e) Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan, koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis sarana dan keselamatan;
- f) UPTD Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas di Bidang Pengujian Bermotor
- g) UPTD Terminal Angkutan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas di bidang pengelolaan terminal angkutan umum sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

1.4.2 Prinsip dan Tata Laksana

Tata laksana Dinas Perhubungan mengacu pada delapan karakter dasar dalam mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik, yaitu :

- a) Partisipasi Aktif dalam merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, membina dan melaksanakan tugas dinas dalam rangka menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
- b) Penegakan hukum, memberi sanksi bagi yang melanggar hukum;
- c) Transparansi, terbuka informasi bagi yang memerlukan kecuali yang sifatnya rahasia negara;
- d) Responsif dalam menjawab tuntutan untuk perbaikan;
- e) Berorientasi pada musyawarah untuk mufakat dalam merencanakan kegiatan, dan menyelesaikan permasalahan yang timbul;
- f) Keadilan dan perlakuan yang sama untuk semua orang dalam melayani;

- g) Efektif dan ekonomis dalam mengelola sumber daya;
- h) Akuntabilitas. Melaksanakan tugas yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pada target target yang ditetapkan

1.4.3 Tata Kerja

- a) Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup dinas maupun dengan perangkat daerah terkait lainnya serta dengan semua unsur di lingkungan pemerintah daerah;
- b) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing - masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang undangan yang berlaku;
- c) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas;
- d) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan visi dan misi dinas serta menjabarkannya dalam program dan kegiatan operasional sesuai tugas dan fungsi serta bertanggungjawab kepada atasannya masing masing dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu waktu;
- e) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan masing masing wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk dan atau arahan kepada bawahan;
- f) Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- g) Dalam menyampaikan laporan kepada Bupati, tembusan laporan Kepala Dinas dapat disampaikan kepada satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

1.4.4 Prosedur Kinerja Dinas



Kepala Dinas

Kepala Dinas bertanggung jawab membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.

Sekretaris

Sekretaris bertanggung jawab kepada membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan sekretariat yang meliputi pengkoordinasian perencanaan program, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian bertugas membantu Sekretaris dalam memimpin urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara.

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan bertanggung jawab membantu Sekretaris dalam memimpin pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, pengelolaan aset, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Sub Bagian Perencanaan bertugas membantu Sekretaris dalam memimpin penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran Dinas.

Bidang Lalu Lintas

Kepala Bidang Lalu Lintas bertanggungjawab membantu Kepala dalam memimpin perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengendalian operasional, dan perlengkapan jalan.

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas bertanggungjawab membantu Kepala Bidang dalam memimpin penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Seksi Perlengkapan Jalan

Kepala Seksi Perlengkapan Jalan bertanggungjawab membantu Kepala Bidang dalam memimpin penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan

JF Analis Kebijakan (Sub.Koordinator Seksi Pengendalian dan Operasional)

Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional bertanggungjawab membantu Kepala Bidang dalam memimpin penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan pelaksanaan kegiatan pengendalian operasional

Bidang Angkutan

Kepala Bidang Angkutan bertanggungjawab membantu Kepala dalam memimpin penyiapan, koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis angkutan orang, serta angkutan khusus dan barang sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Angkutan Orang

Kepala Seksi Angkutan Dalam Trayek bertanggungjawab membantu Kepala Bidang dalam memimpin penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis angkutan orang.

Seksi Angkutan Khusus dan Barang

Kepala Seksi Angkutan Khusus dan Barang bertanggungjawab membantu Kepala Bidang dalam memimpin penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis angkutan khusus dan barang.

Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Perhubungan bertanggungjawab membantu Kepala dalam memimpin penyiapan, koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis sarana dan keselamatan.

Seksi Teknik Sarana

Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor bertanggungjawab membantu Kepala Bidang dalam memimpin penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis sarana.

Seksi Teknik Keselamatan

Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Lalu Lintas bertanggungjawab membantu Kepala Bidang dalam memimpin penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknik keselamatan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Koordinator tenaga fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jenis jabatan fungsional, yaitu pengujian kendaraan bermotor.

Dengan demikian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dibebankan pada 22 jabatan struktural. Secara rinci distribusi jabatan struktural adalah sebagai berikut:

Eselon II/b= 1 jabatan, Eselon III/a= 1 jabatan, Eselon III/b= 3 jabatan, Eselon IV/a = 13 jabatan, dan Eselon IV/b =4 jabatan.



1.4.5 Sumber Daya Dinas Perhubungan

Jumlah pegawai Dinas Perhubungan pada tahun 2024 seluruhnya sebanyak 277 orang. Menurut jenjang pendidikan sebesar 56.68% tamatan SLTA, sedangkan menurut status kepegawaian lebih dari 71,12% merupakan tenaga sukarela sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2024

No	Jenjang Pendidikan	PNS	PPPK	TKS	Jumlah	%
1.	Strata II	8	0	0	8	2.89
2.	Strata I / Diploma IV	36	15	32	83	29.96
3.	Sarjana Muda / Diploma III	7	0	2	9	3.25
4.	Diploma II	5	2	0	7	2.53
5.	SLTA / Sederajat	6	0	151	157	56.68
6.	SLTP / Sederajat	1	0	6	7	2.53
7.	SD	0	0	6	6	2.17
Jumlah		63	17	197	277	100

Sumber: Sub Bagian Tatausaha dan Kepegawaian

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Menurut Status Kepegawaian Tahun 2024

No	Status Kepegawaian	Jumlah	%
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	63	22.74
2.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	17	6.14
3.	Tenaga Kerja Sukarela (TKS)	197	71.12
Jumlah		277	100

Sumber: Sub Bagian Tatausaha dan Kepegawaian

Tabel 1.3 Komposisi Pegawai Negeri Sipil Menurut Kepangkatan Tahun 2024

No	Kepangkatan / Golongan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	IV/c	1	1.6
2.	IV/b	0	0.0
3.	IV/a	3	4.8
4.	III/d	17	27.0
5.	III/c	8	12.7
6.	III/b	3	4.8
7.	III/a	15	23.8
8.	II/d	2	3.2
9.	II/c	13	20.6
10.	II/b	1	1.6
11.	II/a	0	0.0
Jumlah		63	100

No.	Golongan Ruang PPPK	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.		2	11.76
2.		15	88.24
Jumlah		17	100

Sumber: Sub Bagian Tatausaha dan Kepegawaian

Sarana dan Prasarana Pelayanan

Aset dinas yang merupakan barang tidak bergerak dan bergerak barang perlengkapan lainnya, disajikan dalam tabel berikut :

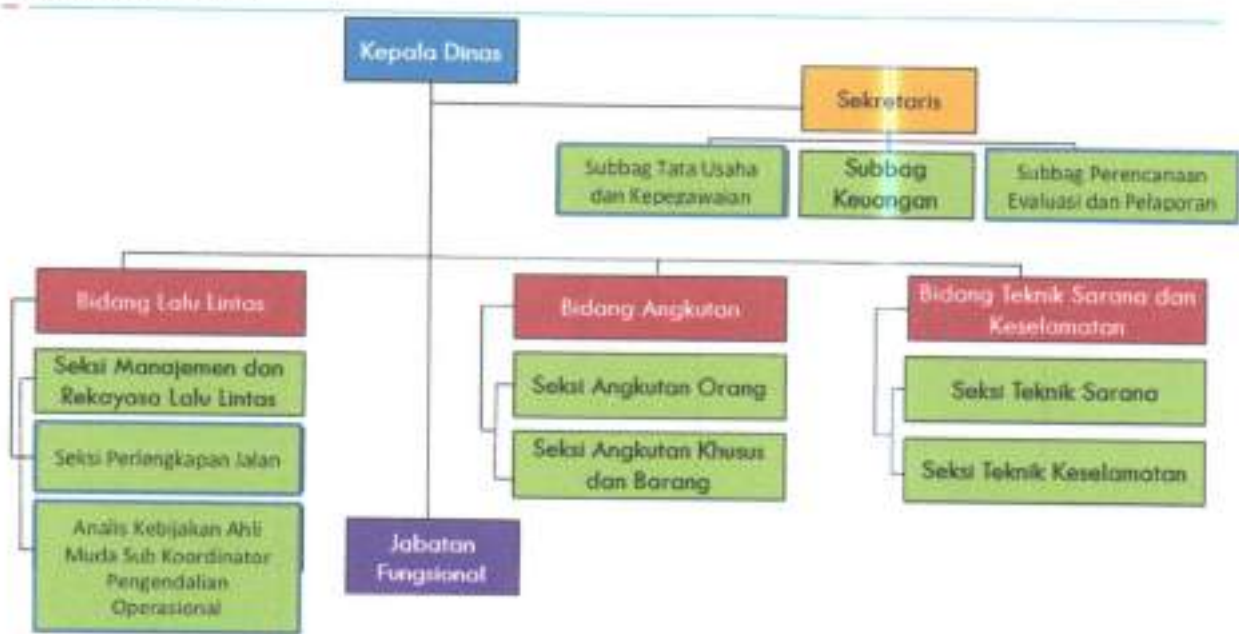
Tabel 1.4 Aset Dinas Perhubungan Tahun 2024

	Saldo Tahun 2023	Saldo Tahun 2024
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	17.924.000,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		19.107.563,00
Piutang Retribusi	256.381.401,88	256.231.401,88
Penyisihan Piutang	-	-
Beban Dibayar dimuka	9.967.141,29	0,00
Persediaan	970.518.071,00	1.098.000.581,00
Jumlah Aset Lancar	998.558.462,29	1.118.108.144,00
ASET TETAP		
Tanah	16.054.600.000,00	16.054.600.000,00
Peralatan dan Mesin	33.198.187.338,87	33.868.329.338,87
Gedung dan Bangunan	11.512.459.914,00	11.512.459.914,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	126.488.444.521,67	141.044.457.898,67
Aset Tetap Lainnya	2.322.000,00	2.322.000,00
Konstruksi dalam Pekerjaan	178.935.000,00	178.935.000,00
Akumulasi Penyusutan	(30.740.586.686,75)	(37.809.853.376,00)
Jumlah Aset Tetap	156.674.362.087,79	164.851.250.775,54
ASET LAINNYA		
Aset Tidak Berwujud	2.908.234.083,00	2.908.234.083,00
Aset Lain – Lain	1.916.281.450,00	1.906.531.450,00
Akumulasi Amortasi Aset Tidak Berwujud	(1.582.520.695,90)	(2.304.480.610,50)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.243.870.637,00)	(1.234.120.637,00)
Jumlah Aset Lainnya	1.998.124.200,10	1.276.164.285,50
Jumlah Total Aset	159.671.044.750,18	167.310.854.161,03

Sumber : Sub Bagian Keuangan

1.5 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur

Sumber : Sub Bagian Tatausaha dan Kepegawaian

Adapun Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur terdapat 4 (empat) UPTD yaitu :

- a) UPTD Terminal Rawabango;
- b) UPTD Terminal Pasir Hayam;
- c) UPTD Terminal Cipanas;
- d) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB).

1.6 ISU STRATEGIS

Permasalahan di bidang perhubungan masih berdampak pada pelayanan Dinas Perhubungan selama kurun waktu 2021 hingga 2026. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi meliputi belum optimalnya efektivitas pengaturan jaringan dan simpul transportasi, rendahnya disiplin pengguna jalan, serta masih terbatasnya fasilitas keselamatan transportasi. Selain itu, ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang belum memadai, belum optimalnya pelaksanaan analisis dampak lalu lintas (andalalin), serta belum maksimalnya koordinasi antar institusi dalam penyelesaian permasalahan lalu lintas juga menjadi tantangan dalam meningkatkan pelayanan transportasi.

Dukungan pemerintah dalam pengembangan infrastruktur transportasi masih perlu ditingkatkan, termasuk dalam penyempurnaan dan sinkronisasi regulasi baik di tingkat pusat maupun daerah. Di sisi lain, masih terdapat kendala dalam penataan ruang untuk kebutuhan transportasi, seperti kurangnya lokasi parkir yang memadai serta belum optimalnya pemanfaatan ruang jalan untuk mendukung kelancaran lalu lintas. Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan lalu lintas juga belum sepenuhnya dimanfaatkan secara efektif, sehingga pengawasan dan pengendalian transportasi masih menghadapi berbagai kendala.

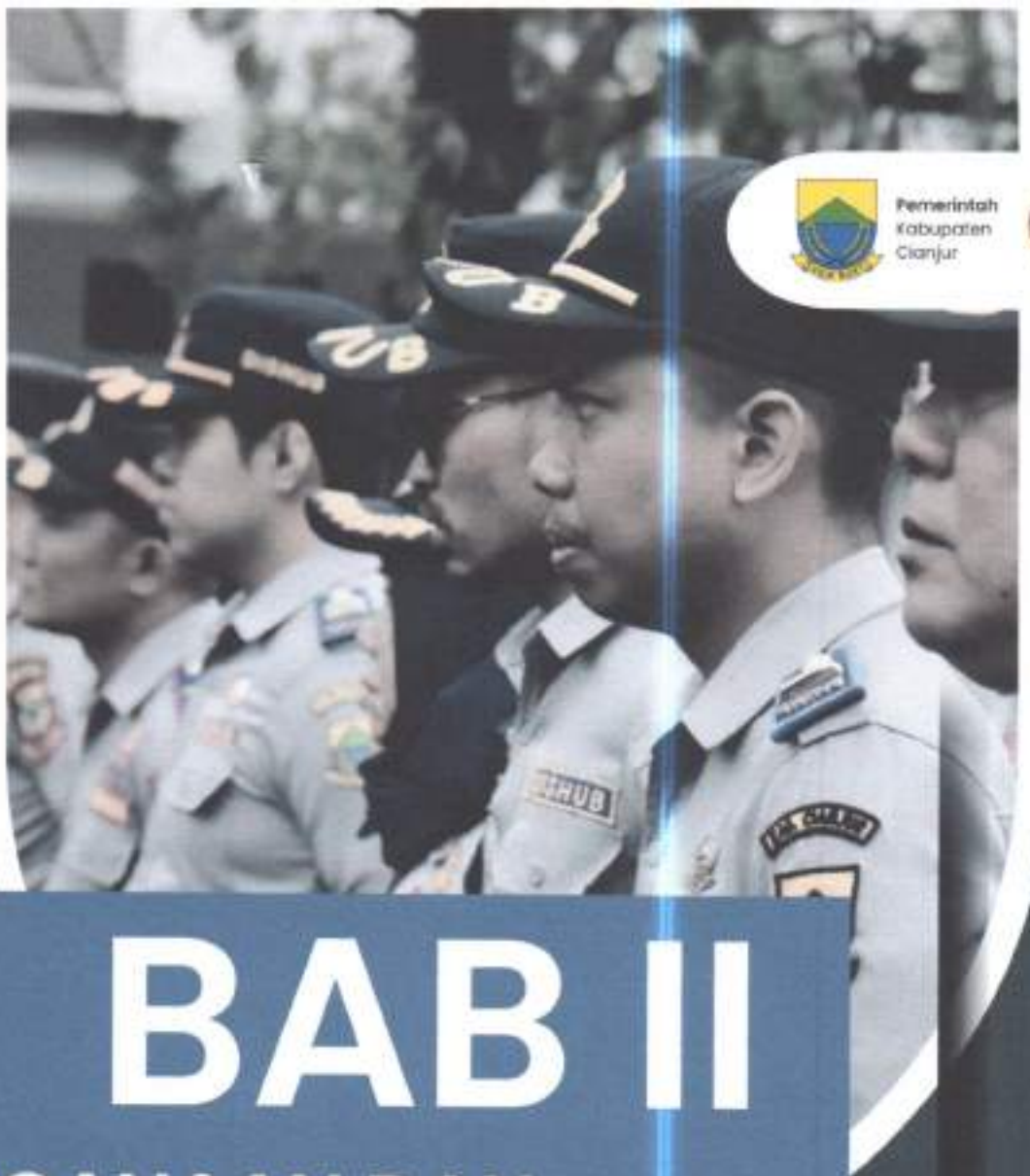
Ketersediaan dan kualitas infrastruktur transportasi yang kurang memadai dalam mendukung pengembangan wilayah juga menjadi kendala utama. Belum terwujudnya sistem jaringan transportasi yang selaras dengan rencana struktur ruang wilayah menyulitkan upaya optimalisasi penggunaan jaringan jalan yang menghubungkan antarwilayah. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia dalam sektor perhubungan masih perlu ditingkatkan agar dapat mendukung pelayanan yang lebih baik. Kemacetan lalu lintas di perkotaan juga menjadi isu strategis yang membutuhkan pendekatan kebijakan multi-aspek, baik pada tingkat makro (tata ruang), mezzo (pengelolaan permintaan transportasi), maupun mikro (pengelolaan jalan di tingkat lokal). Dengan memperhatikan isu – isu tersebut, dirumuskan isu strategis perhubungan sebagai berikut:

Tabel 1.5 Isu Strategis Dinas Perhubungan

No	Permasalahan	Isu Strategis
1	- Belum terpenuhinya sarana dan prasarana transportasi	Fasilitas perlengkapan jalan yang belum optimal
	- Masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan	
	- Belum optimalnya andalalin	
	- Belum adanya rencana induk transportasi jaringan jalan	
2	Masih kurangnya Lokasi parkir yang memadai / belum optimalnya pengelolaan lahan parkir	Pelayanan angkutan darat belum optimal
	Masih rendahnya kinerja pelayanan angkutan darat	
	Belum optimalnya koordinasi antar instansi dalam pengelolaan transportasi	
	Masih terbatasnya penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan lalu lintas	
	Masih rendahnya efektivitas kebijakan pengendalian transportasi	
	Masih terbatasnya peralatan untuk pengujian kendaraan bermotor	



Pemerintah
Kabupaten
Cianjur



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA



Jl. Dr Muwardi No. 395
Muka. Kec. Cianjur,
Kabupaten Cianjur, Jawa
Barat 43275



Instagram
@dishub_cianjur



Email
dishub@cianjurkab.go.id



Link
<https://dishub.cianjurkab.go.id>



21 RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

2.1.1 Visi Misi Kabupaten Cianjur



Visi Kabupaten Cianjur untuk RPJMD periode 2022-2026 adalah "CIANJUR MANJUR BERAHLAK MULIA". Visi Kabupaten Cianjur untuk RPJMD tahun 2021-2026 memiliki makna filosofis seperti Penjelasan Visi Cianjur Manjur Berakhlak Mulia.

Manjur memiliki makna: ampuh, kuat, mempan, berpengaruh, berhasil, meyakinkan, mustajab, dan mujarab. Manjur juga merupakan singkatan dari MANDIRI-MAJU-RELIGIUS.

Mandiri memiliki makna berdiri sendiri. Maju mengandung makna berada pada tingkat peradaban yang tinggi. Religius memiliki makna sikap dan perilaku patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran, serta hidup rukun dengan pemeluk agama lain.

Penjelasan Visi: Akhlak Mulia

Akhlak mulia merupakan barometer yang menentukan baik atau buruknya seseorang serta sebuah masyarakat. Akhlak manusia mencakup tiga cakupan utama yang menjadi sasaran penting dalam pembangunan, yaitu: Akhlak manusia terhadap Tuhan, yang dimanifestasikan dalam peningkatan keimanan dan ketakwaan. Akhlak manusia terhadap sesama, meliputi akhlak dalam keluarga, masyarakat, bernegara, serta beragama. Akhlak manusia terhadap lingkungan alam, yaitu hidup selaras dan harmonis dengan lingkungan alam.

Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi memberikan gambaran lebih jelas mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan daerah Kabupaten Cianjur periode 2021 - 2026, dengan menguraikan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan.

Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Cianjur 2021-2026 adalah:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, bertakwa, dan berakhlak mulia dalam menghadapi era Society 5.0.
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal yang mandiri dan berdaya saing tinggi sesuai dengan tuntutan era Industri 4.0.
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan serta mendukung peningkatan dan pemerataan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
4. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam guna menjamin keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan hidup.

5. Memantapkan reformasi dan transformasi birokrasi pemerintahan untuk mewujudkan sistem pelayanan publik yang semakin baik, profesional, efektif, efisien, serta adaptif menuju era Governance 3.0.

Program Strategis untuk Dinas Perhubungan

Sebagai pendukung Misi ke-3, yaitu melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan serta mendukung peningkatan dan pemerataan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, Dinas Perhubungan berperan dalam pembangunan infrastruktur transportasi yang mendukung konektivitas dan aksesibilitas masyarakat.

Tujuan Misi ke-3:

Terwujudnya infrastruktur dasar daerah yang memadai.

Indikator Tujuan:

Indeks Pembangunan Infrastruktur Daerah.

Sasaran Misi ke-3:

1. Meningkatnya akses dan kualitas jaringan jalan.
2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak.
3. Menurunnya tingkat kerentanan terhadap bencana.

Indikator Sasaran:

1. Persentase panjang jalan kabupaten antar pusat pertumbuhan dalam kondisi baik.
2. Rasio rumah layak huni.
3. Indeks Risiko Bencana.

2.1.2 Tujuan

Dalam mewujudkan target Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026, diperlukan tujuan yang jelas sebagai dasar dalam pencapaian target tersebut.

Adapun tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur adalah: **"Terciptanya transportasi yang nyaman, aman dan berkeselamatan"**

Tujuan ini bertujuan untuk mewujudkan sistem transportasi yang dapat memberikan kenyamanan bagi pengguna, menjamin keselamatan perjalanan, serta mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan transportasi, penyediaan fasilitas perlengkapan jalan yang lebih memadai, serta penerapan kebijakan transportasi yang berorientasi pada keselamatan pengguna jalan.

Selain itu, tujuan ini mendukung pengembangan sistem transportasi yang tertata dengan baik melalui pengelolaan lalu lintas yang lebih efektif, optimalisasi perencanaan jaringan jalan, serta peningkatan disiplin dan kepatuhan pengguna jalan. Penerapan teknologi dalam manajemen transportasi juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan efisiensi dan keamanan perjalanan.

Dengan terciptanya transportasi yang nyaman, aman, dan berkeselamatan, diharapkan dapat mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Cianjur. Sasaran pembangunan perhubungan di Kabupaten Cianjur pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Kinerja Layanan Perhubungan

Peningkatan kualitas kinerja layanan perhubungan dilakukan dengan optimalisasi sistem manajemen lalu lintas untuk meningkatkan kelancaran dan keselamatan perjalanan. Selain itu, akan diperkuat koordinasi antar instansi dalam penyelesaian permasalahan transportasi dan lalu lintas, serta penguatan regulasi dan kebijakan transportasi berbasis keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan transportasi, seperti pemantauan lalu lintas berbasis CCTV dan sistem informasi transportasi, juga menjadi prioritas. Pengawasan dan pengendalian operasional transportasi darat akan ditingkatkan agar dapat memberikan layanan yang lebih efisien dan efektif.

Indikator Sasaran

a. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas, berdasarkan:

- 1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021, mengenai hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan serta keuangan daerah.
- 2) Berita Acara Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Tahun 2024, tertanggal 5 Oktober 2023.
- 3) Surat Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/294/AA.05/2023, tertanggal 27 November 2023, tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023.

b. Persentase Kendaraan Umum/Barang Laik Jalan di Kabupaten Cianjur.

c. Persentase Layanan Angkutan.

Secara rinci, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 2.1 Rencana Strategis Dinas Perhubungan

Misi RPJMD	Tujuan PD	Indikator Kinerja Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Kinerja Sasaran PD
Misi ke-3 Melanjutkan Pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan serta mendukung peningkatan dan pemerataan Pembangunan bidang Pendidikan, Kesehatan dan ekonomi	Terciptanya transportasi yang nyaman, aman dan berkeselamatan	Persentase penurunan kejadian kecelakaan	Meningkatnya kualitas kinerja layanan perhubungan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas
				Persentase kendaraan umum / barang laik jalan di Kabupaten Cianjur
				Persentase layanan angkutan

22 CASCADING DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIANJUR

Indikator RPJMD	Meningkatnya akses dan kualitas jaringan jalan					
Indikator Sasaran RPJMD	Persentase panjang jalan kabupaten setiap pusat pemerintahan dalam kondisi baik					
Pengguna	BUPATI KAB.CIANJUR					
Sasaran Rencana	Meningkatnya Kualitas Kinerja Layanan Perhubungan					
Indikator Sasaran Rencana	Indikator Sasaran 1 :					
Pengguna	Kepala Dinas Perhubungan Kab.Cianjur- Drs. TEDY ARTIYAN, M.Si					
Sasaran Program	Tercapainya perhubungan jalan yang memadai					
Indikator Program	Persentase perhubungan jalan yang memadai (100%)					
Pengguna	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB.CIANJUR- Drs. TEDY ARTIYAN, M.Si					
Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
Sasaran Kegiatan	Tercapainya Perhubungan Jalan di Pusat Jalan Kabupaten	Tercapainya dokumen Perencanaan Hasil Analisis	Meningkatnya manajemen dan rekayasa lalu lintas			
Indikator Kegiatan	Persentase Perhubungan Jalan yang memadai	Persentase dokumen analisis yang lengkap	Persentase tinjauan jalan yang direvisasi			
Pengguna	KEPALA BIDANG LALU LINTAS- BIAN SAEPUON, SH, MH					
Nama Kegiatan	Penyediaan Perhubungan jalan di jalan	Penyediaan Hasil Analisis Tempak Lalu	Peneraksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota			
Sasaran Kinerja	Tercapainya Perhubungan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tertulusarnya Rekrutasi dan Penambahan Perhubungan Jalan	Tercapainya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Tercapainya dokumen kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Tercapainya dan Tercapainya Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Tercapainya dan Tercapainya Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja	Jumlah Sarana dan prasarana Perhubungan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Perhubungan Jalan yang Tercapainya dan terpelihar	Jumlah Perencanaan Analisis yang Digunakan Kapasitasnya	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Hasil Analisis	Jumlah Laporan Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan
Pengguna	KEPALA SEKSI PERENCANAAN JALAN- W WIRATY SAPUTRA, S.S.T/DTL, M.Si		KEPALA SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS- KUGBAL S. SH			
Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Perhubungan jalan di jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perhubungan jalan	Peningkatan kapasitas perencana	Koordinasi dan sinkronisasi perencana hasil analisis	Peneraksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan

Gambar 2.1 Cascading Dinas Perhubungan

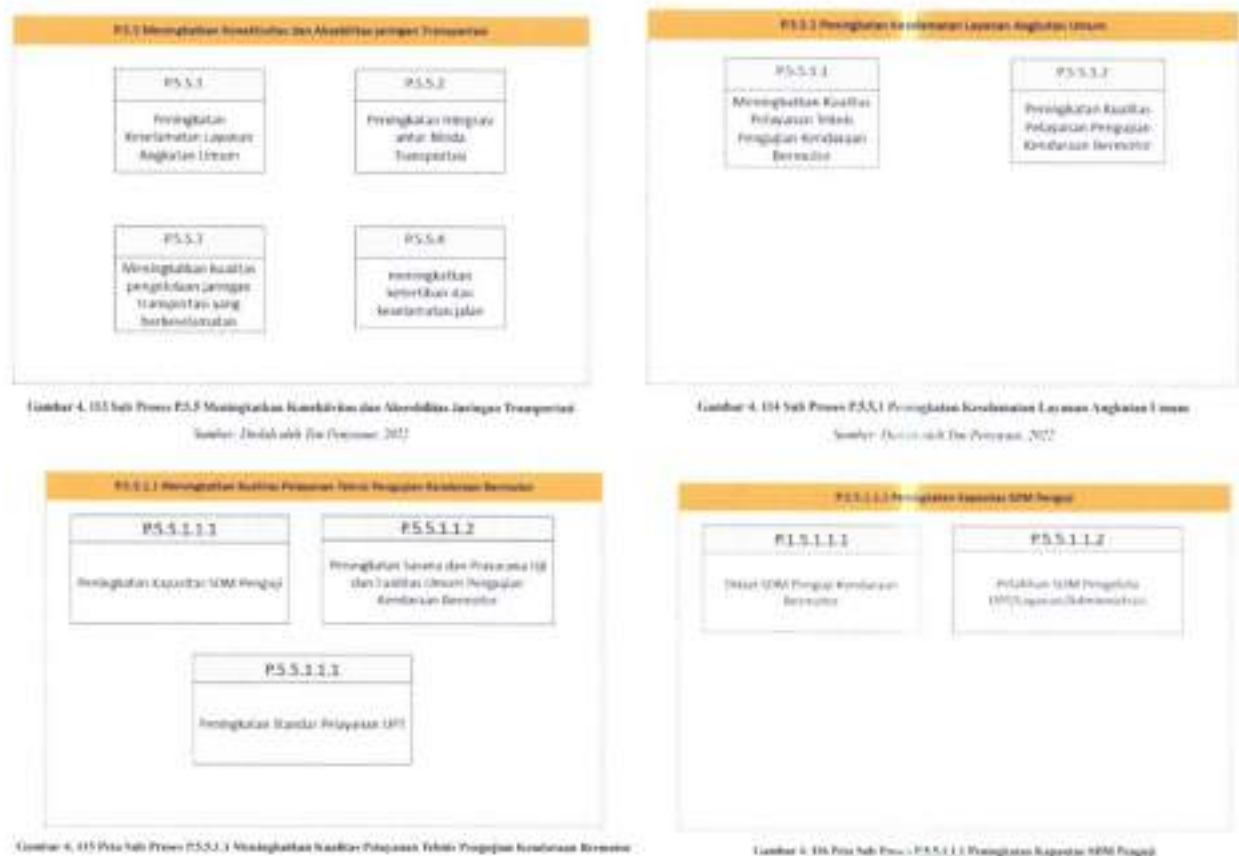
23 PETA PROSES BISNIS DINAS PERHUBUNGAN

Proses Bisnis Dinas Perhubungan



Gambar 4. 112 Peta Proses 5 Membangun Infrastruktur Dasar Daerah yang Memadai dan Saling Terkoneksi

Sumber: Diolah oleh Tim Penyusun, 2022



Gambar 2.2 Peta Probis

24 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan perjanjian kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyusunan dan penetapan kinerja dimulai dengan merumuskan Rencana Strategis (Renstra), yaitu rencana jangka menengah (lima tahunan), yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (Renja). Berdasarkan Renja tersebut, diajukan dan disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan tersebut.

Setelah anggaran disetujui, ditetapkanlah penetapan kinerja, yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dalam tahun berjalan, pelaksanaan perjanjian kinerja ini akan dilakukan melalui pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hasil pengukuran tersebut kemudian dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Di bawah ini adalah tolak ukur pembuatan LAKIP, yaitu Penetapan Kinerja, yang tercantum pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIANJUR

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas kinerja layanan perhubungan	01.01 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	100%

		01.02	Persentase kendaraan umum/barang laik jalan di Kabupaten Cianjur	100%
		01.03	Persentase Layanan Angkutan	53,68%
2.	Terwujudnya pengelolaan manajemen perkantoran Dinas Perhubungan	02.01	Persentase Pengelolaan Manajemen Perkantoran Dinas Perhubungan	100%

2.5 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024

Struktur anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.13.000.000,00 Belanja Operasi Rp. 32.509.117.910,00 dan Belanja Modal Rp. 3.886.274.346,00 Urusan Wajib sebesar Rp. 15.526.683.596,00 dan Urusan Pemerintahan Daerah (Penunjang Urusan) Rp. 20.868.708.660,00

Anggaran belanja langsung per sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7 Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategis Tahun 2024

NO	Sasaran	Anggaran	Target	Indikator Sasaran	
	Meningkatnya kualitas kinerja layanan perhubungan	15.526.683.596,00	100%	01.01	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan
				01.02	Persentase kendaraan umum/barang laik jalan di Kabupaten Cianjur
				01.03	Persentase Layanan Angkutan
	Terwujudnya pengelolaan manajemen perkantoran Dinas Perhubungan	20.868.708.660,00	100%	02.01	Persentase Pengelolaan Manajemen Perkantoran Dinas Perhubungan



Pemerintah
Kabupaten
Cianjur



BAB III

AKUNTABILITAS KERJA



Jl. Dr Muwardi No. 396
Muka, Kec. Cianjur,
Kabupaten Cianjur, Jawa
Barat 43215



Instagram
@dishub_Cianjur



Email
dishub@cianjurkab.go.id



Link
<https://dishub.cianjurkab.go.id>

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Oleh karena itu, pengukuran kinerja perlu didukung dengan ketersediaan data kinerja yang akurat dan terpercaya.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk memperoleh data yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Pengumpulan data ini tetap memperhatikan prinsip keseimbangan antara biaya dan manfaat, serta mengedepankan efisiensi dan efektivitas.

Untuk mendukung pengukuran kinerja yang optimal, perlu dibangun sistem informasi kinerja yang terintegrasi dengan sistem pencatatan data di setiap unit kerja. Sistem ini bertujuan untuk memastikan keterpaduan informasi yang digunakan dalam pemantauan dan evaluasi kinerja.

Kerangka Pengukuran Kinerja terdiri dari beberapa tahapan, dimulai dari pengumpulan data kinerja hingga proses pengukuran kinerja. Indikator kinerja yang digunakan sebagai acuan telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja yang tercantum dalam rencana kerja tahunan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur menyajikan gambaran tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Laporan ini disusun secara sistematis dan kelembagaan sebagai tolok ukur untuk menilai kinerja instansi pemerintah.

3.2 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi:

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran ordinal seperti pada tabel 3.1

Tabel 3.1 Sasaran Ordinal

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	> 91	Sangat Tinggi	
2.	76 > 90	Tinggi	
3.	66 > 75	Sedang	
4.	51 > 65	Rendah	
5.	< 50	Sangat Rendah	

3.3 CAPAIAN KINERJA ATAS IKU

Capaian IKU Tahun 2024

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Tabel 3.2 Tabel Pencapaian IKU Tahun 2024

No.	Kinerja Utama	IKU	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024 (%)	Capaian Tahun 2024 Terhadap Target Akhir (RPJMD)	Yak
1.	Meningkatnya kualitas kinerja layanan perhubungan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas	%	101,57	100	100	100	100	Tercapai
		Persentase kendaraan umum/barang laik jalan di Kabupaten Cianjur	%	68,44	100	87,67	87,67	87,67	Tidak Tercapai
		Persentase layanan angkutan	%	50,49	53,68	55,72	103,80	103,80	Tercapai
2.	Terwujudnya pengelolaan manajemen perkantoran Dinas Perhubungan	Persentase pengelolaan manajemen perkantoran dinas perhubungan	%	100	100	100	100	100	Tercapai



Gambar 3.1 Pencapaian IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur Tahun 2024

Tabel 3.3 Capaian Tahun 2022 sampai dengan tahun 2024

Capaian IKU Tahun 2022 sampai Tahun 2024								
No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Rumus Perhitungan	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Periode Awal Periode RPJMD	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
1.	Meningkatnya kualitas kinerja layanan perhubungan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas	$\frac{\sum \text{Realisasi Jumlah Perlengkapan Jalan Terpasang}}{\sum \text{Target Jumlah Perlengkapan Jalan Terpasang}} \times 100\%$	%	98,67	100,98	101,57	100
			$\frac{300}{300} \times 100\% = 100\%$					
		Persentase kendaraan umum/barang tak jalan di Kabupaten Cianjur	$\frac{\sum \text{Realisasi Jumlah Wajib}}{\sum \text{Target Jumlah Wajib Upr}} \times 100\%$	%	77,14	77,77	68,44	87,67
			$\frac{10.520}{12.000} \times 100\% = 87,67\%$					
Persentase layanan angkutan	$\frac{\text{Jumlah Penumpang dilayani pertahun}}{\text{Jumlah Kapasitas Angkutan Pertahun}} \times 100\%$	%	35,71	108,00	100,31	103,80		
	$\frac{14.605.355}{14.070.670} \times 100\% = 103,80\%$							

Jika dilihat dari tabel yang disajikan diatas pencapaian IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur pada Indikator Persentase Kendaraan Umum/Barang Laik Jalan belum mencapai target karena kurangnya kesadaran pemilik kendaraan wajib uji untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor, meskipun tarif uji kendaraan telah digratiskan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi dan penegakan regulasi, agar pemilik kendaraan lebih memahami pentingnya uji berkala dalam menjamin keselamatan dan kelayakan kendaraan di jalan. Indikator Persentase Layanan Angkutan mengalami kenaikan karena peningkatan kesadaran masyarakat pengguna angkutan umum. Hal ini terjadi karena sosialisasi yang dilakukan secara simultan saat pendataan angkutan, sehingga masyarakat lebih memahami manfaat dan keandalan layanan angkutan yang tersedia. Akibatnya, terjadi peningkatan jumlah pengguna angkutan umum, yang berdampak pada capaian indikator layanan angkutan.

3.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023

Pada tahun 2024, Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur mencatat perubahan capaian kinerja dibandingkan dengan tahun 2023. Berikut adalah perbandingan capaian pada indikator utama:

- 1) Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas mengalami sedikit penurunan dari 101,57% pada tahun 2023 menjadi 100% pada tahun 2024. Meskipun terjadi penyesuaian, pencapaian ini tetap menunjukkan bahwa sarana dan prasarana lalu lintas masih tersedia sesuai standar.
- 2) Persentase Kendaraan Umum/Barang Laik Jalan di Kabupaten Cianjur mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 19,23%, dari 68,44% pada tahun 2023 menjadi 87,67% pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya perbaikan dalam aspek kelaikan kendaraan umum dan barang di wilayah Kabupaten Cianjur.
- 3) Persentase Layanan Angkutan juga menunjukkan peningkatan dari 50,49% pada tahun 2023 menjadi 55,72% pada tahun 2024, atau meningkat sebesar 5,23%. Kenaikan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam penyediaan layanan angkutan guna mendukung mobilitas masyarakat.

Secara keseluruhan, capaian kinerja tahun 2024 menunjukkan perbaikan pada aspek kelaikan kendaraan umum/barang dan layanan angkutan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, aspek ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas tetap perlu dipertahankan agar kualitas pelayanan perhubungan di Kabupaten Cianjur semakin optimal.

3.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Realiasi kinerja tahun ini tidak dapat disandingkan dengan standar nasional, karena indikator kinerja yang dihitung hanya oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur

3.4 PENGUKURAN DAN ANALISIS KINERJA

Tujuan : Terciptanya transportasi yang nyaman, aman dan berkeselamatan

Berdasarkan dokumen Renstra, Dinas Perhubungan memiliki tujuan Terciptanya transportasi yang nyaman, aman dan berkeselamatan ,dan memiliki 1 sasaran yaitu Meningkatnya kualitas kinerja layanan perhubungan, serta memiliki 3 indikator sasaran yaitu:

3.4.1 Indikator Sasaran 1 : Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas

Realisasi indikator sasaran 1 : Persentase ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas adalah 100% atau masuk kategori **SANGAT TINGGI**. Dicapai dengan **kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**. Perhitungan Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas diperoleh dari :

Jumlah Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas :

$$\frac{\sum Realisasi \text{ Jumlah Perlengkapan Jalan Terpasang}}{\sum Target \text{ Jumlah Perlengkapan Jalan Terpasang}} \times 100\%$$

Adapun realisasi jumlah perlengkapan jalan terpasang sebesar 300 unit sedangkan target Jumlah Perlengkapan Jalan Terpasang sebesar 300 unit sehingga Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas pada Tahun 2024 sebesar 100 % atau capaian 100%.

Capaian kinerja sasaran 1 dapat dilihat pada tabel 3.4 dan Gambar 3.2.

Tabel 3.4 Rata – Rata Capaian Kinerja Indikator Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	100%	100%	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data



Gambar 3.2 Trend Capaian Kinerja Indikator Sasaran Ke-1

Adapun capaian terhadap target akhir Renstra mencapai 100% hal tersebut dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini.



Gambar 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Indikator 1 terhadap Akhir Renstra

Indikator Sasaran 1



Permasalahan:

- 1) perlengkapan jalan yang baru diperbaiki rusak kembali karena vandalisme atau faktor eksternal
- 2) Keterbatasan jumlah kendaraan operasional yang mengakibatkan ketidakefektifan dalam menjalankan pekerjaan.

Solusi

- 1) Melakukan kampanye kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga fasilitas umum dan dampak negatif dari vandalisme. Edukasi bisa dilakukan melalui media sosial, sekolah, dan komunitas lokal.
- 2) Mengajak masyarakat sekitar untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi dan melaporkan tindakan vandalisme atau kerusakan pada perlengkapan jalan.
- 3) Merencanakan penganggaran kendaraan operasional Penerangan Jalan Baru.
- 4) Memastikan kendaraan yang ada tetap dalam kondisi optimal dengan pemeliharaan berkala, sehingga tidak terjadi gangguan operasional yang memperburuk keterbatasan armada.

Adapun capaian terhadap target akhir Renstra mencapai 87,67% hal tersebut dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini.



Gambar 3.5 Capaian Kinerja Sasaran Indikator 2 terhadap Akhir Renstra

Indikator Sasaran 2



Permasalahan :

- 1) Kurangnya kesadaran Masyarakat pemilik kendaraan wajib uji untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor, meskipun tarif uji kendaraan telah di gratiskan

Solusi :

- 1) Mengadakan kampanye kesadaran melalui media sosial, radio, spanduk, dan brosur yang menjelaskan pentingnya uji kendaraan bermotor bagi keselamatan di jalan.
- 2) Meningkatkan pengawasan dan razia kendaraan di jalan raya, terutama bagi kendaraan yang belum melakukan uji berkala dan Berkoordinasi dengan kepolisian untuk penegakan hukum, misalnya dengan menerapkan tilang atau sanksi administratif bagi pemilik kendaraan yang tidak melakukan uji berkala.

3.4.3 Indikator Sasaran 3 : Persentase layanan angkutan



Realisasi Indikator Sasaran 3: Persentase Layanan Angkutan tercapai 103,80% dari target 100% atau masuk kategori **SANGAT TINGGI**. Dicapai dengan **Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota dan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor : SK.687/AJ.206/DRDJ/2002 bahwa klasifikasi trayek di Kabupaten Cianjur untuk Trayek angkutan umum (Mobil Penumpang Umum) termasuk kedalam trayek ranting, jenis pelayanan ekonomi dengan kapasitas 250-300 penumpang. Perhitungan Persentase layanan angkutan diperoleh dari :

$$\text{Jumlah Persentase Layanan Angkutan} = \frac{\text{Jumlah Penumpang yang di layani pertahun}}{\text{Jumlah Kapasitas Angkutan pertahun}} \times 100\%$$

Adapun jumlah kapasitas angkutan tahun 2024 sebesar 14.070.670 sedangkan jumlah penumpang yang di layani adalah 14.605.355 sehingga persentase Layanan Angkutan pada Tahun 2024 sebesar 55,77% atau capaian 103,80%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir pada renstra capaian persentase layanan angkutan sebesar 55,77% dari target 53,68%.

Capaian kinerja sasaran 3 dapat dilihat pada tabel 3.6 dan Gambar 3.6.

Tabel 3.6 Rata – Rata Capaian Kinerja Indikator Sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase layanan angkutan	53,68%	55,72%	103,80%

Sumber: Hasil Pengolahan Data



Gambar 3.6 Capaian Kinerja Pada Indikator 3



Adapun capaian terhadap target akhir Renstra mencapai 103,80% hal tersebut dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini.



Gambar 3.7 Capaian Kinerja Sasaran Indikator 3 terhadap Akhir Renstra

3.4.4 Prasarana Perhubungan

Prasarana perhubungan meliputi shelter/pangkalan/halte dan terminal angkutan penumpang. Kabupaten Cianjur sampai saat ini baru memiliki 3 tempat terminal yaitu Terminal Rawabango (tipe C), Terminal Pasirhayam (tipe C), Terminal Cipanas (tipe C), serta 6 halte/shelter/pangkalan. Adanya penurunan pada halte/shelter dikarenakan adanya alih fungsi menjadi pedestrian. Jumlah prasarana perhubungan sebagaimana pada tabel berikut ini

Tabel 3.7 Jumlah Prasarana Perhubungan di Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2023-2024

No	Prasarana Perhubungan	2023	2024
1.	Terminal	3	3
2.	Halte/Shelter/Pangkalan	7	6

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur Tahun 2024

Layanan Angkutan Penumpang Umum Dalam Trayek

Jumlah Armada Angkutan Umum di Kabupaten Cianjur pada Tahun 2024 sebanyak 5.252 unit. Adapun angkutan umum dibagi menjadi dua kategori yaitu Armada Angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan dengan rincian jumlah angkutan sebagaimana dalam tabel di bawah ini.



Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur

Gambar 3.8 Jumlah Angkutan Penumpang Umum Dalam Trayek Kabupaten Cianjur Tahun 2024

Program Prioritas Bupati

Kampung Caang

Kampung Caang adalah program untuk memberikan akses penerangan di jalan pada pusat-pusat pertumbuhan atau kampung-kampung yang belum mendapat akses penerangan di Kabupaten Cianjur. Perwujudan kampung caang pada aspek penerangan ini diwujudkan oleh Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pada Kegiatan Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota. Adapun pembagian pekerjaan sub kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota terdiri dari pekerjaan pembangunan baru dan pemeliharaan. Pembangunan PJU baru terdiri dari pekerjaan :

- 1) Pengadaan dan pemasangan Stang PJU dan
- 2) Pengadaan dan pemasangan Tiang PJU.

Sedangkan Pemeliharaan PJU terdiri dari

- a. Pergantian lampu PJU Sodium ke LED,
- b. Pergantian lampu PJU LED yang rusak dan
- c. Perbaikan Jaringan listrik.

Jumlah akses penerangan yang dibutuhkan untuk mewujudkan kampung caang ini adalah sebanyak 108 desa dengan perkiraan kebutuhan adalah 2 unit PJU setiap desa dengan target 1000 titik.

Adapun penyelenggaraan kampung caang pada tahun 2024 sudah tercapai 242 kampung dengan capaian 121 % dari target 200 Kampung, sedangkan capaian program Kampung Caang sampai akhir Renstra sudah mencapai 882 kampung atau 88,2% dari target 1000 kampung.

Program Kampung Caang berhasil melampaui target dengan capaian 121%, yang menunjukkan efektivitas dalam penyediaan penerangan jalan. Hal ini berkontribusi pada peningkatan keamanan lalu lintas dan berkurangnya kecelakaan pada malam hari. Capaian tersebut dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.8 Target Capaian Kinerja Kampung Caang

PROGRAM MANUJUR	SKOP PELAKSANAAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TAHUN 2024					
					TARGET		REALISASI FAKS			
					KINERJA	LOKASI	KINERJA		%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kampung Caang	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (SLAJ)	Penyediaan Perangkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perangkapan Jalan di Jalat Kabupaten/Kota	200	Kampung	Tersatur	242	Kampung	121%

PROGRAM MANUJUR	SKOP PELAKSANAAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SLAJ Desember 2024					
					TARGET		REALISASI FAKS			
					KINERJA	LOKASI	2021	2024	SLAJ 2024	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kampung Caang	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (SLAJ)	Penyediaan Perangkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perangkapan Jalan di Jalat Kabupaten/Kota	1000	Kampung	Tersatur	361	342	Kampung 802 80,2%

Sumber : Bidang Lalu Lintas

3.5 INFORMASI KEUANGAN TERKAIT PENCAPAIAN SASARAN

Untuk mewujudkan tercapainya indikator sebagaimana yang telah diuraikan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh dalam pencapaian keberhasilan indikator dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cianjur. APBD Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 36.395.392.256,00. Terdiri dari anggaran Belanja Operasi Rp. 32.509.117.910,00 dan Anggaran Belanja Modal Rp. 3.886.274.346,00 Anggaran Belanja Urusan Wajib Rp. 15.526.683.596,00 dengan realisasi Rp. 15.420.863.526,00 sebesar 99,32% dan Non Urusan sebesar Rp. 20.868.708.660,00 dan terealisasi sebesar Rp. 19.856.695.613,00 atau dengan capaian 95,15%.

Tabel 3.9 Anggaran dan realisasi APBD Dinas Perhubungan Tahun 2024

No	Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Operasi	32.509.117.910,00	31.405.988.351,00	96,61
2	Belanja Modal	3.886.274.346,00	3.871.570.788,00	99,62
3	Belanja Tidak Terhingga	-	-	-
4	Belanja Transfer	-	-	-
JUMLAH		36.395.392.256,00	35.277.559.139,00	96,93

Sumber: Sub Bagian Keuangan

Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2024 berdasarkan sasaran tercantum pada Tabel 3.8.

Tabel 3.10 Pengukuran Pencapaian Sasaran Dinas Perhubungan Tahun 2024

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU	REALISASI
Meningkatnya kualitas kinerja layanan perhubungan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas	7.952.134.896,00	7.870.175.221,00
	Persentase kendaraan umum/barang laik jalan di Kabupaten Cianjur	5.939.830.800,00	5.918.654.845,00
	Persentase Layanan Angkutan	1.634.717.900,00	1.632.033.460,00
Terwujudnya pengelolaan manajemen perkantoran dinas perhubungan	Persentase pengelolaan manajemen perkantoran Dinas Perhubungan	20.868.708.660,00	19.856.695.613,00
Total		36.395.392.256,00	35.277.559.139,00

Sumber: Sub Bagian Keuangan

Secara kumulatif, realisasi yang mendukung kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2024 mencapai sebesar Rp 35.277.559.139,00 atau 96,93% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 36.395.392.256,00.

Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran Tahun 2024

Capaian kinerja dan capaian anggaran tahun 2024 yaitu:

Tabel 3.11 Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran Tahun 2024

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA	ANGGARAN
Meningkatnya kualitas kinerja layanan perhubungan	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	100	7.952.134.896,00
	Persentase Kendaraan umum/barang laik jalan di Kabupaten Cianjur	87,67	5.939.830.800,00
	Persentase Layanan Angkutan	103,80	1.634.717.900,00

Rincian Program dan Kegiatan Urusan Wajib Penunjang yang mendukung sasaran strategis selengkapnya tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.12 Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Wajib

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	15.526.683.596,00
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	5.470.977.846,00
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	4.632.213.846,00
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	838.764.000,00
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	840.627.500,00
Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	840.627.500,00
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	3.291.950.000,00
Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	180.000.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	3.111.950.000,00
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.747.880.800,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	57.668.000,00
Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	1.690.012.800,00
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.3996.982.050,00
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.627.112.050,00
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	769.870.000,00
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	84.175.000,00
Peningkatan Kapasitas Andalalin	64.175.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	20.000.000,00
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	900.000.000,00
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	900.000.000,00
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	794.090.400,00
Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk Jasa angkutan orang dan/atau Barang antar kota dalam 1(satu) Kab/Kota	794.090.400,00

Realisasi kinerja anggaran yang mendukung strategi meningkatnya kualitas kinerja layanan perhubungan disajikan pada tabel berikut :

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Target Kinerja		Realisasi Keuangan	
					Rp.	%
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Input	15.526.683.596,00		15.420.863.526,00	99,32
		Dana				
		Indikator				
		Presentase perlengkapan jalan yang memadai	100,00	Persen	100,00	Persen
		presentase sarana dan prasarana perhubungan darat yang tersedia	100,00	Persen	100,00	Persen
		presentase keselamatan dan ketertiban lalu lintas	100,00	Persen	100,00	Persen

2.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Input Dana Output Persentase Perlengkapan Jalan yang tersedia Outcome Menunjang persentase perlengkapan jalan yang memadai	5.470.977.846,00 100,00 100,00	Persen Persen	5.409.616.109,00 100,00 100,00	Persen Persen	98,88
2.1.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Input Dana Output Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia	4.632.213.846,00 300,00	unit	4.598.727.383,00 300,00	unit	99,28
2.1.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Input Dana Output Jumlah perlengkapan jalan yang ter rehabilitasi dan terpelihara	838.764.000,00 60,00	unit	810.888.726,00 60,00	unit	98,88
2.2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Input Dana Output Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara Outcome Menunjang persentase layanan angkutan	840.627.500,00 3,00 100,00	unit unit Persen	839.863.760,00 3,00 100,00	Unit Unit Persen	99,91
2.2.1	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Input Dana Output Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	840.627.500,00 1,00	Dokumen	839.863.760,00 1,00	Dokumen	99,91
2.3	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Input Dana Output Persentase dokumen penyelenggaraan perparkiran Outcome Menunjang keselamatan dan ketertiban lalu lintas	3.291.950.000,00 100,00 100,00	Persen Persen	3.280.454.040,00 100,00 100,00	Persen Persen	99,65
2.3.1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Input Dana Output Jumlah dokumen pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	180.000.000,00 1,00	Dokumen	180.000.000,00 1,00	Dokumen	100,00

2.3.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Input Dana Output Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/Kota	3.111.950.000,00	3.100.454.040,00	99,63
2.4	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Input Dana Output Persentase kendaraan yang diuji Outcome Menunjang persentase keselamatan dan ketertiban lalu lintas	1.747.880.800,00	1.740.263.625,00	99,56
2.4.1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Kendaraan Bermotor	Input Dana Output Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	57.868.000,00	57.846.000,00	99,96
2.4.2	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Input Dana Output Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Tendaftar	1.690.012.800,00	1.682.417.625,00	99,55
2.5	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Input Dana Output Persentase titik/ruas jalan yang direkayasa Outcome Menunjang persentase perlengkapan jalan yang memadai	2.396.982.050,00	2.383.961.496,00	99,46
2.5.1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Input Dana Output Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1.627.112.050,00	1.622.377.160,00	99,71
2.5.2	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Input Dana Output Jumlah Laporan Pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	769.870.000,00	761.574.338,00	98,92

2.6	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Input Dana Output Persentase dokumen ANDALALIN yang tersedia Outcome Menunjang persentase perlengkapan jalan yang memadai	84.175.000,00 100,00 100,00	Persen Persen Persen	76.607.614,00 100,00 100,00	Persen Persen Persen	91,01
2.6.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalin	Input Dana Output Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalin	64.175.000,00 6,00	Laporan Laporan	60.134.360,00 6,00	Laporan Laporan	93,70
2.6.2	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalin	Input Dana Output Jumlah Penilai Andalin yang Ditingkatkan Kompetensinya dan tersertifikasi	20.000.000,00 2,00	Orang Orang	16.473.254,00 2,00	Orang Orang	82,37
2.7	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Input Dana Output Persentase dokumen inspeksi, audit, dan pemantauan Sistem Manajemen Perusahaan Angkutan Umum Outcome Menunjang persentase ketertiban dan keselamatan lalu lintas	900.000.000,00 100,00 100,00	Persen Persen Persen	897.937.180,00 100,00 100,00	Persen Persen Persen	99,77
2.7.1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Input Dana Output Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	900.000.000,00 4,00	Laporan Laporan	897.937.180,00 4,00	Laporan Laporan	99,77
2.8	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Input Dana Output Persentase trayek yang diawasi Outcome Menunjang tersedianya sarana dan prasarana perhubungan darat	794.090.400,00 100,00 100,00	Persen Persen Persen	792.169.700,00 100,00 100,00	Persen Persen Persen	99,76
2.8.1	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Input Dana Output Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 kabupaten/kota	794.090.400,00 12,00	Laporan Laporan	792.169.700,00 12,00	Laporan Laporan	99,76
			15.526.683.596,00		15.420.863.526,00		99,32

Capaian Kinerja Urusan Perhubungan

Hasil dari kegiatan – kegiatan tersebut adalah :

1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Capaian kinerja kegiatan (8) dengan indikator Persentase Perlengkapan Jalan yang tersedia dengan target sebesar 100% dengan realisasi 100%.

Anggaran pada Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp.5.470.977.846,00 dengan realisasi sebesar Rp.5.409.616.109,00 mencapai 98.88%

Hasil dari Kegiatan tersebut antara lain:

- a. Jumlah Perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota : 300 unit
- b. Jumlah Perlengkapan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara : 60 unit

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terkendala masalah:

- a. perlengkapan jalan yang baru diperbaiki rusak kembali karena vandalisme atau faktor eksternal
- b. Keterbatasan jumlah kendaraan operasional yang mengakibatkan ketidakefektifan dalam menjalankan pekerjaan.

2. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Capaian kinerja kegiatan (9) dengan indikator Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara sebesar 100% dengan realisasi 100%

Anggaran pada Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C sebesar Rp.840.627.500,00 Dengan realisasi sebesar Rp. 839.863.760.000 atau mencapai 99,91%.

Hasil dari Kegiatan tersebut antara lain:

- a. Jumlah terminal (fasilitas utama dan pendukung) yang diawasi: 3 Terminal

3. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Capaian kinerja kegiatan (10) dengan indikator persentase dokumen penyelenggaraan perparkiran sebesar 100% dengan realisasi 100%.

Anggaran pada Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir sebesar Rp.3.291.950.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.3.280.454.040,00 atau mencapai 99,65%.

Hasil dari Kegiatan tersebut antara lain:

- a. Jumlah dokumen pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik : 1 Dokumen
- b. Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas parkir kewenangan Kab/Kota: 12 Laporan;
- c. Honorarium juru parkir;
- d. Sosialisasi Persyaratan Perizinan Parkir yang berbasis OSS
- e. Pembinaan Juru Parkir
- f. Sosialisasi Parkir Berlangganan

4. Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor

Capaian kinerja kegiatan (11) dengan indikator Persentase kendaraan yang diuji sebesar 100% dengan realisasi 93,83%.

Anggaran pada kegiatan (11) sebesar Rp.1.747.880.800,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.740.263.625,00.

Hasil dari Kegiatan tersebut antara lain:

- a. Jumlah SDM Penguji berkala kendaraan bermotor yang ditingkatkan kapasitasnya: 3 orang
- b. Jumlah kendaraan wajib berkala kendaraan bermotor yang terdaftar : 10.520 kendaraan

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terkendala masalah;

Kurangnya kesadaran Masyarakat pemilik kendaraan wajib uji untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor, meskipun tarif uji kendaraan telah di gratiskan

Solusi pemecahannya:

- Mengadakan kampanye kesadaran melalui media sosial, radio, spanduk, dan brosur yang menjelaskan pentingnya uji kendaraan bermotor bagi keselamatan di jalan.
- Meningkatkan pengawasan dan razia kendaraan di jalan raya, terutama bagi kendaraan yang belum melakukan uji berkala dan Berkoordinasi dengan kepolisian untuk penegakan hukum, misalnya dengan menerapkan tilang atau sanksi administratif bagi pemilik kendaraan yang tidak melakukan uji berkala.

5. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Capaian kinerja kegiatan (12) dengan indikator Persentase titik/ruas jalan yang direkayasa sebesar 100% dengan realisasi 100%

Anggaran pada Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp.2.396.982.050,00 dengan realisasi sebesar Rp.2.383.951.498,00 atau sebesar 99,46%

Hasil dari Kegiatan tersebut antara lain:

Jumlah laporan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan : 3 laporan (rekayasa lalu lintas natal, tahun baru dan idul fitri)

Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota : 12 Laporan

6. Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota

Capaian kinerja kegiatan (13) dengan indikator Persentase Dokumen Andalalin yang disetujui sebesar 100% dengan realisasi 100%

Anggaran pada Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp.84.175.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.76.607.614,00 mencapai 91,01%

Hasil dari Kegiatan tersebut antara lain:

- a. Jumlah Laporan koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil Andalalin : 6 Laporan

- b. Jumlah Penilai Andalalin yang ditingkatkan Kapasitasnya: 2 Orang
- 7. Kegiatan Audit dan Inpeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

Target kinerja kegiatan dengan indikator persentase dokumen inspeksi audit dan pemantauan sisten manajemen sebesar 100% dengan realisasi 100%.

Anggaran pada Kegiatan tersebut Rp900.000.000,00 Dengan realisasi sebesar Rp.897.937.180,00 atau 99,77% .

Hasil dari Kegiatan tersebut antara lain:

 - a. Jumlah Laporan Inspeksi audit dan pemantauan sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum: 4 Laporan
- 8. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Target kinerja kegiatan (15) dengan indikator persentase trayek yang diawasi sebesar 100% dengan realisasi 100%.

Anggaran pada Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.794.090.400,00 Dengan realisasi sebesar Rp.792.169.700,00 mencapai 99,76%.

Hasil dari Kegiatan tersebut antara lain :

Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Org dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 Kab/Kota: 12 Laporan

3.6 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi penggunaan sumber daya di Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur mencakup penggunaan anggaran, tenaga kerja (SDM), sarana & prasarana, serta kebijakan strategis dalam mencapai target kinerja.

Pada periode 2022-2024, ada beberapa perubahan signifikan yang mempengaruhi efisiensi, seperti bantuan provinsi untuk PJU, peningkatan jumlah penguji kendaraan, pengadaan alat uji baru, serta penghapusan tarif uji kendaraan bermotor akibat UU No. 1 Tahun 2022. Analisis berikut menguraikan bagaimana setiap sumber daya digunakan dan bagaimana efisiensi ditingkatkan.

1. Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Kinerja Keseluruhan

Tabel 3.13 Perbandingan Total Anggaran dan Capaian Kinerja

Tahun	Total Anggaran (Rp)	Belanja Operasi Target (Rp)	Belanja Operasi Realisasi (Rp)	Belanja Modal Target (Rp)	Belanja Modal Realisasi (Rp)	Realisasi Total (Rp)	Realisasi vs Pagu (%)	Capaian Kinerja Rata – Rata (%)
2022	62.258.936.239,00	25.197.437.139,00	23.895.405.979,00	37.061.499.100,00	12.024.263.701,00	35.919.669.680,00	57,7	100,98
2023	101.408.054.060,00	29.650.090.010,00	27.481.537.559,00	71.757.964.050,00	70.498.093.669,00	97.979.631.228,00	96,6	90,11
2024	36.395.392.256,00	32.509.117.910,00	31.405.988.351,00	3.886.274.346,00	3.871.570.788,00	35.277.559.139,00	96.93	96,6

Analisis:

- Tahun 2022 memiliki tingkat efisiensi rendah (57,7%) karena adanya Rp 25 M dana Banprov yang tidak terserap akibat gempa bumi dan kendala proyek PJU pada Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur.
- Tahun 2023 memiliki realisasi anggaran tertinggi (96,6%), tetapi capaian kinerja tidak sebanding dengan kenaikan anggaran karena dampak UU No. 1 Tahun 2022 yang menghapus retribusi uji kendaraan, sehingga banyak pemilik kendaraan menunda pengujian.
- Tahun 2024 penggunaan anggaran dan kinerja keseluruhan lebih efisien, karena meskipun anggaran lebih kecil, capaian kinerja tetap tinggi.

2. Efisiensi Penggunaan SDM dan Sarana dalam Pengujian Kendaraan Bermotor

Analisis:

- Tahun 2022, pengujian kendaraan terhambat karena tidak ada penguji bersertifikat tingkat 5 dan alat uji yang sudah usang, sehingga kendaraan berat di atas 17.000 kg tidak bisa diuji di Kabupaten Cianjur.
- Tahun 2023, efisiensi meningkat karena pengujian lebih optimal setelah ada diklat penguji, tetapi alat uji masih usang, yang menghambat akurasi dan waktu uji.
- Tahun 2024, efisiensi meningkat signifikan karena adanya pengadaan alat uji baru seperti Headlight Tester Robotic berbasis teknologi modern, yang mengefektifkan ketepatan uji serta mengurangi waktu pengujian.

Rekomendasi:

- Evaluasi efektivitas alat uji baru dalam mempercepat proses pengujian dan meningkatkan akurasi hasil uji.
- Optimalisasi SDM penguji untuk mengantisipasi pertumbuhan kendaraan berat.

3. Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana (PJU/Kampung Caang)

Tabel 3.14 Perbandingan Pencapaian PJU dari 2022-2024

Tahun	Target Tahunan	Realisasi	Sumber Pendanaan
2022	200	279	Banprov + APBD
2023	200	361	Banprov + APBD
2024	200	242	APBD

Analisis:

- Tahun 2022-2023 lebih efisien dalam jumlah pemasangan PJU karena ada tambahan bantuan provinsi.
- Tahun 2024 tetap mencapai target (242 kampung dari 200) meskipun tanpa bantuan provinsi, yang menunjukkan bahwa ada optimalisasi dalam penggunaan APBD.
- Secara total, hingga 2024 sudah terpasang 882 kampung dari target 1000 kampung (88,2%), sehingga masih on track untuk target RPJMD 2026.

Rekomendasi:

- Mengupayakan sumber pendanaan lain seperti kerja sama dengan swasta untuk memastikan target 1000 kampung tercapai pada 2026.
- Meninjau ulang strategi pengadaan PJU agar tetap efisien meskipun tanpa bantuan provinsi.

BAB IV

PENUTUP



Pemerintah
Kabupaten
Cianjur



LKIP



Jl. Dr Muwardi No. 395
Muka, Kec. Cianjur,
Kabupaten Cianjur, Jawa
Barat 43215



Instagram
@dishub_Cianjur



Email
dishub@cianjurkab.go.id



Link
<https://dishub.cianjurkab.go.id>

41 KESIMPULAN

Dari hasil evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur selama tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja secara umum telah memenuhi target yang ditetapkan. Terdapat dua indikator utama yang masuk dalam kategori **Sangat Tinggi** dan satu indikator dalam kategori **Tinggi**. Satu indikator telah melampaui target di atas 100%, sementara satu indikator lainnya belum mencapai target, yaitu sebesar 87,67%. Tingkat pencapaian dan ketercapaian indikator kinerja utama (IKU) dapat dilihat pada gambar terkait dalam laporan ini.

Dari segi efisiensi sumber daya, peningkatan efektivitas dalam pengujian kendaraan bermotor terjadi dengan pengadaan alat uji baru berbasis teknologi modern. Kendala terkait jumlah penguji bersertifikat yang sebelumnya menjadi hambatan telah diatasi melalui peningkatan kapasitas SDM. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, seperti rendahnya kesadaran pemilik kendaraan wajib uji dan keterbatasan anggaran untuk pengembangan infrastruktur transportasi.

42 HAMBATAN DAN SIMPULAN

Hambatan yang terdapat di dalam Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur, antara lain sebagai berikut:

1. Kerusakan Perlengkapan Jalan – Perlengkapan jalan yang baru diperbaiki sering mengalami kerusakan akibat vandalisme atau faktor eksternal.
2. Keterbatasan Kendaraan Operasional – Terbatasnya jumlah kendaraan operasional mengakibatkan ketidakefektifan dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
3. Kesadaran Masyarakat yang Masih Rendah – Masih banyak pemilik kendaraan yang belum melakukan uji kendaraan berkala, meskipun tarif uji kendaraan telah digratiskan.
4. Pembatalan Program Kerjasama Parkir Berlangganan – Program ini tidak dapat direalisasikan karena bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2015, di mana Kakorlantas Polri menetapkan bahwa pelayanan Samsat hanya melibatkan Kepolisian, Bapenda Provinsi, dan Jasa Raharja.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur, antara lain sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pengawasan di lapangan dan melakukan Uji kir Keliling ;
Setiap tahunnya dilakukan pengajuan anggaran untuk Pembangunan Terminal
Kurangnya kesadaran Masyarakat pemilik kendaraan wajib uji untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor, meskipun tarif uji kendaraan telah di gratiskan;
2. Kurangnya kesadaran Masyarakat pemilik kendaraan wajib uji untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor, meskipun tarif uji kendaraan telah di gratiskan;
3. Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat dan pelajar akan pentingnya keselamatan berlalu lintas;

4. Sosialisasi untuk peningkatan pengelolaan perparkiran, sosialisasi program parkir berlangganan kepada masyarakat luas baik secara langsung maupun dengan media social.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur Tahun 2024 kami buat. Kami menyadari bahwa LKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur Tahun 2024 ini masih belum sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan, saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan penyusunan LKIP di masa yang akan datang



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan : Dr. Muwardi No. : 395 Cianjur 43215
Telp. (0263) 263424, 261897 Fax. (0263) 284536
<https://dishub.cianjurkab.go.id/> e-mail : dishub_cianjurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 500.11.1 / 313 / DISHUB / 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2024**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah setiap tahun Dinas Perhubungan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Surat Edaran Nomor 000.8.6.3/4/Setda/01/2025 Tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024
- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

- KEDUA** : Tugas pokok tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut;
- a. Mengumpulkan dan monitoring data realisasi kinerja;
 - b. Menganalisa data untuk penyusunan LKIP.
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas tim dimaksud adalah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan;
- PETIKAN** : disampaikan kepada masing-masing yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 3 Februari 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIANJUR



Drs. TEDY ARTIAWAN, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19661127 198703 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan : Dr. Muwardi No. : 395 Cianjur 43215
Telp. (0263) 263424, 261897 Fax. (0263) 284536
<https://dishub.cianjurkab.go.id/> e-mail : dishub_cianjurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 500.11.1 / 28 / DISHUB / 2024

TENTANG

MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur Kabupaten Cianjur Tahun 2024, maka diperlukan Mekanisme Pengumpulan Data Capaian Kinerja;
- b. bahwa dengan adanya Mekanisme Pengumpulan Data Capaian Kinerja maka pengumpulan data kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur akan lebih terarah dengan hasil yang lebih akurat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 70);
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 99 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Perhubungan Kabupaten Cianjur tentang Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur Tahun 2024;
- KESATU** : Menetapkan Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur Tahun 2024;
- KEDUA** : Data Kinerja yang dimaksud pada Diktum KESATU meliputi dokumen yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target kinerja yang ada dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur Tahun 2024;
- KETIGA** : Mekanisme Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I serta Penanggung Jawab ketersediaan data capaian kinerja tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cianjur
Pada Tanggal, 2 Januari 2025
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Cianjur



Drs. TEDY ARTIAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661127 198703 1 004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Cianjur;
2. Bapak Inspektur Inspektorat Daerah;
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Cianjur.

MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		KEPALA DINAS	TIM PENYUSUN	KEPALA BIDANG	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT / KELUARAN
1.	Memerintahkan untuk mengumpulkan data kinerja				Surat Edaran Penyusunan LKIP, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, RENSTRA, RENJA	5 Menit	SK Tim LKIP
2.	Menyusun rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan pengumpulan data kinerja				SK Tim Penyusunan LKIP, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, RENSTRA, RENJA	3 Hari	Format Data Kinerja
3.	Menyampaikan format data kinerja kepada Bidang terkait				Format Data Kinerja	4 Jam	Format Data Kinerja yang telah diterima oleh setiap Bidang
4.	Mengisi Format Data Kinerja oleh Bidang Terkait				Data – data kinerja hasil monitoring dan evaluasi	5 Hari	Format Data Kinerja yang telah diisi
							

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		KEPALA DINAS	TIM PENYUSUN	KEPALA BIDANG	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT / KELUARAN
				<pre> graph TD Start([Start]) --> Process[] Process --> Decision{ } Decision -- Y --> End([End]) Decision -- T --> Start </pre>			
5.	Menghimpun Data Kinerja				Format data kinerja yang telah diisi	1 Hari	Data – data kinerja yang terhimpun dari semua Bidang
6.	Memverifikasi, mengklasifikasi dan mengevaluasi kesesuaian data kinerja yang diserahkan oleh Bidang				Data – data kinerja yang terhimpun dari semua Bidang	1 Hari	Data – data kinerja yang telah diverifikasi kesesuaiannya dengan kebutuhan penyusunan LKIP
7.	Mengkompilasi data kinerja yang dijadikan dasar penyusunan LKIP (Hasil pengumpulan data)						

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Cianjur

Dr. Tedy Artawan, M.Si
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19661127 198703 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan : Dr. Muwardi No. : 395 Cianjur 43215 Telp. (0263) 263424, 261897 Fax.
(0263) 284536 https://dishub_cianjurkab.go.id/ e-mail : dishub_cianjurkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. DADAN GINANJAR, S.AP., M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : H. Herman Suherman
Jabatan : Bupati Cianjur

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



H. Herman Suherman

Cianjur, 19 Januari 2024

Pihak Pertama

Kepala Dinas Perhubungan

H. DADAN GINANJAR, S.AP., M.Si
NIP. 197112041991011002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Transportasi	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	100
2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Transportasi	Persentase kendaraan umum/barang laik jalan di kabupaten cianjur	100
3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Transportasi	Persentase Layanan Angkutan	53,68
4	Terwujudnya pengelolaan manajemen perkantoran Dinas Perhubungan	Persentase pengelolaan manajemen perkantoran Dinas Perhubungan	100

No	Program Eselon II / III	Anggaran
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	12.964.644.950
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.324.616.960

Pihak Kedua



H. Herman Suherman

Cianjur, 19 Januari 2024

Pihak Pertama

Kepala Dinas Perhubungan



H. DADAN GINANJAR, S.AP., M.Si

NIP. 197112041991011002



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan : Dr. Muwardi No. : 395 Cianjur 43215
Telp. (0263) 263424, 261897 Fax. (0263) 284536
<https://dishub.cianjurkab.go.id/> e-mail : dishub_cianjurkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YUDHA AZWAR, SE, MH
Jabatan : Sekretaris Dinas Perhubungan

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : H. DADAN GINANJAR, S.IP, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA


H. DADAN GINANJAR, S.IP, M.Si
NIP. 19711204 199101 1 002

Cianjur, 19 Januari 2024
PIHAK PERTAMA


YUDHA AZWAR, SE, MH
NIP. 19791216 200212 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024
PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIANJUR

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		TARGET
1.	Terwujudnya pengelolaan manajemen perkantoran Dinas Perhubungan	1.1	Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	1.1.1	Persentase pengelolaan manajemen perkantoran Dinas Perhubungan	100%
		1.1.1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	1.1.1.1	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%
		1.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.1.1.2	Persentase administrasi keuangan Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik	100%
		1.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.1.1.3	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terkelola dengan baik	100%
		1.1.4	Administrasi Umum Perangkat daerah	1.1.1.4	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terkelola dengan baik	100%
		1.1.5	Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	1.1.1.5	Persentase Pengelolaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%
		1.1.6	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1.1.1.6	Persentase pengadaan barang milik daerah	100%
		1.1.7	Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1.1.1.7	Persentase pemeliharaan Barang milik Daerah	100%

NO	Program/Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	265.556.150	APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	10.657.280.130	APBD
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	539.713.380	APBD
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	793.997.000	APBD
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	187.316.000	APBD
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	8.409.658.000	APBD

7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	471.096.300	APBD
----	--	-----	-------------	------

PIHAK KEDUA



H. DALAN GINANJAR, S.IP, M.Si
NIP. 19711204 199101 1 002

Cianjur, 19 Januari 2024
PIHAK PERTAMA



YUDHA AZWAR, SE, MH
NIP. 19791216 200212 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan : Dr. Muwardi No. : 395 Cianjur 43215
Telp. (0263) 263424, 261897 Fax. (0263) 284536
<https://dishub.cianjurkab.go.id/> e-mail : dishub_cianjurkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IMAN SAEPUDIN, SH, MH
Jabatan : Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : H. DADAN GINANJAR, S.IP, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cianjur, 19 Januari 2024
PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

H. DADAN GINANJAR, S.IP, M.Si
NIP. 19711204 199101 1 002


IMAN SAEPUDIN, SH, MH
NIP. 19740203 200012 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024
KEPALA BIDANG LALU LINTAS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIANJUR

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		TARGET
1	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	1.1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.1.1	Persentase Perlengkapan Jalan yang memadai	100%
		1.1.1	Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	1.1.1.1	Persentase Perlengkapan Jalan yang tersedia	100%
		1.2.1	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	1.2.1.1	Persentase dokumen andalalin yang disetujui	100%
		1.3.1	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	1.3.1.1	Persentase titik/ruas jalan yang direkayasa	100%

NO	Program/Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten/Kota	Rp.	3.807.498.500	APBD
2.	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Rp.	1.986.397.750	APBD
3.	Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Sndalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota	Rp.	69.000.000	APBD

PIHAK KEDUA



H. DADAN GINANJAR, S.IP, M.Si
NIP. 19711204 199101 1 002

Cianjur, 19 Januari 2024
PIHAK PERTAMA


IMAN SAEPUDIN, SH, MH
NIP. 19740203 200012 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan : Dr. Muwardi No. : 395 Cianjur 43215
Telp. (0263) 263424, 261897 Fax. (0263) 284536
<https://dishub.cianjurkab.go.id/> e-mail : dishub_cianjurkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : I. ANSORI, SH, MH
Jabatan : Kepala Bidang Angkutan

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : H. DADAN GINANJAR, S.IP, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

H. DADAN GINANJAR, S.IP, M.Si
NIP. 19711204 199101 1 002

Cianjur, 19 Januari 2024
PIHAK PERTAMA

I. ANSORI, SH, MH
NIP. 19661206 200604 1 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024
KEPALA BIDANG ANGKUTAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIANJUR

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		TARGET
1	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	1.1	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.1.1	Persentase sarana dan prasarana perhubungan darat yang tersedia	100%
		1.1.1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah	1.1.1.1	Persentase trayek orang umum yang diawasi	100%
				1.1.1.2	Persentase angkutan barang umum yang dilayani	100%
		1.1.2	Pengelolaan Terminal penumpang Tipe C	1.1.2.1	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara	3

NO	Program/Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Pengelolaan Terminal penumpang Tipe C	Rp.	996.827.500	APBD
2.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah	Rp.	660.090.400	APBD

PIHAK KEDUA



H. DADANGINANJAR, S.IP, M.Si
NIP. 19711204 199101 1 002

Cianjur, 19 Januari 2024
PIHAK PERTAMA



IANSORI, SH, MH
NIP. 19661206 200604 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PERHUBUNGAN

Jalan : Dr. Muwardi No. : 395 Cianjur 43215
Telp. (0263) 263424, 261897 Fax. (0263) 284536
<https://dishub.cianjurkab.go.id/> e-mail : dishub_cianjurkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RIZKI MUNGgaran I, S.SiT, MM
Jabatan : Kepala Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : H. DADAN GINANJAR, S.IP, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cianjur, 19 Januari 2024
PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

H. DADAN GINANJAR, S.IP, M.Si
NIP. 19711204 199101 1 002


RIZKI MUNGgaran I, S.SiT, MM
NIP. 19870311 201001 1 004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024
KEPALA BIDANG TEKNIK SARANA DAN KESELAMATAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIANJUR

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		TARGET
1	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	1.1	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.1.1	Persentase keselamatan dan ketertiban lalu lintas	100%
		1.1.1	Penerbitan ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan fasilitas Parkir	1.1.1.1	Persentase dokumen penyelenggaraan perparkiran	100%
		1.1.2	Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	1.1.2.1	Persentase dokumen inspeksi, audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan	100%

NO	Program/Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Rp.	3.209.950.000	APBD
2.	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Rp.	600.000.000	APBD

PIHAK KEDUA



H. DADAN GINANJAR, S.IP, M.Si
 NIP. 19711204 199101 1 002

Cianjur, 19 Januari 2024
PIHAK PERTAMA


RIZKI MUNGgaran I, S.SiT, MM
 NIP. 19870311 201001 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan : Dr. Muwardi No. : 395 Cianjur 43215
Telp. (0263) 263424, 261897 Fax. (0263) 284536
<https://dishub.cianjurkab.go.id/> e-mail : dishub_cianjurkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUPERI FAIZAL, ST
Jabatan : Sekretaris Dinas Perhubungan

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. TEDY ARTIAWAN, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cianjur, 20 September 2024
PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Drs. TEDY ARTIAWAN, M.Si
NIP. 19661127 198703 1 004


SUPERI FAIZAL, ST
NIP. 19781028 200901 1 006

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024
SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIANJUR

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		TARGET
1.	Terwujudnya Pengelolaan Manajemen Perkantoran Dinas Perhubungan	1.1	Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	1.1.1	Persentase pengelolaan manajemen perkantoran Dinas Perhubungan	100%
		1.1.1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	1.1.1.1	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%
		1.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.1.1.2	Persentase administrasi keuangan Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik	100%
		1.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.1.1.3	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terkelola dengan baik	100%
		1.1.4	Administrasi Umum Perangkat daerah	1.1.1.4	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terkelola dengan baik	100%
		1.1.5	Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintahan Dearah	1.1.1.5	Persentase Pengelolaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%
		1.1.6	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1.1.1.6	Persentase pengadaan barang milik daerah	100%
		1.1.7	Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1.1.1.7	Persentase pemeliharaan Barang milik Daerah	100%

NO	Program/Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Perencanaan,Pengan ggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	307.887.150	APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	11.288.077.130	APBD
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	664.932.180	APBD
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	965.045.250	APBD
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	259.745.000	APBD
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	6.749.100.6610	APBD

7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	633.921.289	APBD
----	--	-----	-------------	------

PIHAK KEDUA


Drs. TEDY ARTIAWAN, M.Si
 NIP. 1966127 198703 1 004

Cianjur, 20 September 2024
 PIHAK PERTAMA


SUPERI FAIZAL, ST
 NIP. 19781028 200901 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan : Dr. Muwardi No. : 395 Cianjur 43215
Telp. (0263) 263424, 261897 Fax. (0263) 284536
<https://dishub.cianjurkab.go.id/> e-mail : dishub_cianjurkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IMAN SAEPUDIN, SH, MH
Jabatan : Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. TEDY ARTIAWAN, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA


Drs. TEDY ARTIAWAN, M.Si
NIP. 19661127 198703 1 004

Cianjur, 20 September 2024
PIHAK PERTAMA



IMAN SAEPUDIN, SH, MH
NIP. 19740203 200012 1 002

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024
KEPALA BIDANG LALU LINTAS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIANJUR

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		TARGET
1	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	1.1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.1.1	Persentase Perlengkapan Jalan yang memadai	100%
		1.1.1	Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	1.1.1.1	Persentase Perlengkapan Jalan yang tersedia	100%
		1.2.1	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	1.2.1.1	Persentase dokumen andalalin yang disetujui	100%
		1.3.1	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	1.3.1.1	Persentase titik/ruas jalan yang direkayasa	100%

NO	Program/Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten/Kota	Rp.	5.470.977.846	APBD
2.	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Rp.	2.396.982.050	APBD
3.	Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Sndalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota	Rp.	84.175.000	APBD

PIHAK KEDUA



Drs. TEDY ARTIAWAN, M.Si
NIP. 19661127 198703 1 004

Cianjur, 20 September 2024
PIHAK PERTAMA



IMAN SAEPUDIN, SH, MH
NIP. 19740203 200012 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan : Dr. Muwardi No. : 395 Cianjur 43215
Telp. (0263) 263424, 261897 Fax. (0263) 284536
<https://dishub.cianjurkab.go.id/> e-mail : dishub_cianjurkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : I. ANSORI, SH, MH
Jabatan : Kepala Bidang Angkutan

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. TEDY ARTIAWAN, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cianjur, 20 September 2024
PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Drs. TEDY ARTIAWAN, M.Si
NIP. 19661127 198703 1 004


I. ANSORI, SH, MH
NIP. 19661206 200604 1 005

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024
KEPALA BIDANG ANGKUTAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIANJUR

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		TARGET
1	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	1.1	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.1.1	Persentase sarana dan prasarana perhubungan darat yang tersedia	100%
		1.1.1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah	1.1.1.1	Persentase trayek orang umum yang diawasi	100%
				1.1.1.2	Persentase angkutan barang umum yang dilayani	100%
		1.1.2	Pengelolaan Terminal penumpang Tipe C	1.1.2.1	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara	3

NO	Program/Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Pengelolaan Terminal penumpang Tipe C	Rp.	840.627.500	APBD
2.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah	Rp.	794.090.400	APBD

PIHAK KEDUA



Drs. TEDY ARTAWAN, M.Si
NIP. 19661127 198703 1 004

Cianjur, 20 September 2024
PIHAK PERTAMA



I ANSORI, SH, MH
NIP. 19661206 200604 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan : Dr. Muwardi No. : 395 Cianjur 43215
Telp. (0263) 263424, 261897 Fax. (0263) 284536
<https://dishub.cianjurkab.go.id/> e-mail : dishub_cianjurkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RIZKI MUNGgaran I, S.SiT, MM
Jabatan : Kepala Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. TEDY ARTIAWAN, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cianjur, 20 September 2024
PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Drs. TEDY ARTIAWAN, M.Si
NIP. 19661127 198703 1 004


RIZKI MUNGgaran I, S.SiT, MM
NIP. 19870311 201001 1 004

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024
KEPALA BIDANG TEKNIK SARANA DAN KESELAMATAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIANJUR

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		TARGET
1	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	1.1	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.1.1	Persentase keselamatan dan ketertiban lalu lintas	100%
		1.1.1	Penerbitan ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan fasilitas Parkir	1.1.1.1	Persentase dokumen penyelenggaraan perparkiran	100%
		1.1.2	Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	1.1.2.1	Persentase dokumen inspeksi, audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan	100%

NO	Program/Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Rp.	3.291.950.000	APBD
2.	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Rp.	900.000.000	APBD

PIHAK KEDUA



Drs. TEDY ARTIAWAN, M.Si
NIP. 19661127 198703 1 004

Cianjur, 20 September 2024
PIHAK PERTAMA



RIZKI MUNGgaran I, S.SiT, MM
NIP. 19870311 201001 1 004